



LAPORAN KEUANGAN

(Audited)

**KELURAHAN JATINEGARA KAUM
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA**

31 Desember 2025

Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur
Jl. TB. Badaruddin, Tanah Koja

KATA PENGANTAR

Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan yang berisi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Kelurahan Jatinegara Kaum

Hendica Kuswandari, S.P., M.Si.

NIP. 197107101998032006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET	
KINERJA	9
2.1 EKONOMI MAKRO.....	9
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	9
2.3 PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA.....	10
BAB III RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	11
3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	11
3.1.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	13
3.2 NERACA	15
3.2.1 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	17
3.3 LAPORAN OPERASIONAL.....	22
3.3.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	24
3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	25
3.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	26
3.5 PENGUNGKAPAN LAIN	26
3.6 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	27
BAB IV PENUTUP	28



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum Laporan Keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum adalah menyajikan informasi mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna, yaitu meliputi Kelurahan Jatinegara Kaum, Legislatif, Lembaga Pemeriksa/Pengawas, untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya pada level Kelurahan Jatinegara Kaum. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);



21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jakarta Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
25. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014;
27. Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2014 tentang Pedoman Pentausahaan Keuangan Daerah;



29. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua;
30. Peraturan Gubernur Nomor 1245 Tahun 2015 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Kota Administrasi Jakarta Timur;
31. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
32. Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana
33. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
35. DPA-SKPD Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim Provinsi DKI Jakarta Nomor 370/DPA/2025 Tanggal 28 Desember 2025;
36. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
37. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
38. P-DPA-SKPD Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim Provinsi DKI Jakarta Nomor 370/P-DPA/2025 Tanggal 25 September 2025.



1.3 Pendekatan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum per 31 Desember 2025 Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) periode 02 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang berada di lingkungan Kelurahan Jatinegara Kaum yang terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional;
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.3.2 Pendekatan Penyajian Laporan Keuangan

Neraca per 31 Desember 2025 menyajikan informasi tentang posisi keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum. Penyusunan Neraca per 31 Desember 2025 dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai seluruh aset, utang dan ekuitas dana Kelurahan Jatinegara Kaum per 31 Desember 2025.

Aset yang dicatat dalam neraca mencakup seluruh aset yang dimiliki dan atau dikuasai Kelurahan Jatinegara Kaum, meliputi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya per 31 Desember



2025. Utang yang dicatat mencakup kewajiban Kelurahan Jatinegara Kaum per 31 Desember 2025. Ekuitas Dana adalah hak residual Kelurahan Jatinegara Kaum atas aset setelah dikurangi seluruh kewajiban.

1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KELURAHAN JATINEGARA KAUM PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

2.1 Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum, dalam hal ini di wilayah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, mencakup aspek kebijakan di bidang pengeluaran/belanja.

Di bidang pengeluaran, Kelurahan Jatinegara Kaum melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.



2.3 Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2025, Kelurahan Jatinegara Kaum mempunyai 4 program yang terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Kecamatan;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.



BAB III

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur pada TA 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di Lingkungan Pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

3.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

Realisasi Belanja Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur pada TA 2025 adalah sebesar **Rp. 10.042.244.481,00** atau sebesar **97,25 %** dari total anggaran belanja **Rp. 10.326.745.812,00**



3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KELURAHAN JATINEGARA KAUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
LAPORAN REALISASI BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 31 DESEMBER 2025	%	REALISASI 31 DESEMBER 2024
1	2	3	4	5	6
<u>PENDAPATAN</u> PENDAPATAN ASLI DAERAH	A.1	-	-	-	-
<u>BELANJA</u> BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	A.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang & Jasa	A.2.2	10.233.645.505	9.954.399.081,	97,25	9.623.496.882-
Belanja Hibah	A.2.3			-	
Jumlah Belanja Operasi		10.233.645.505	9.954.399.081,	97,25	9.623.496.882,-
<u>BELANJA MODAL</u>					
Belanja Tanah		-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	A.2.4	93.100.307,-	87.845.400,-	-	-
Belanja Gedung dan Bangunan		-	-	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-	-
Belanja Aset Lainnya		-	-	-	-
Jumlah Belanja Modal		-	-	-	170.648.870
JUMLAH BELANJA	A.2	10.326.745.812,	10.042.244.481	97,25	9.684.546.796
SURPLUS/DEFISIT		(10.326.745.812)	(10.042.244.481)	97,25	(9.684.546.796)



3.1.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

A.1 Pendapatan

Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menganggarkan penerimaan pendapatan.

A.2. Belanja

Realisasi Belanja Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. **10.042.244.481,00** atau sebesar 97,25 % dari total anggaran belanja Rp. **10.326.745.812,00**

A.2.1 Belanja Pegawai

Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menganggarkan Belanja Pegawai.

A.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **9.954.399.081,-** dan Rp. **9.623.496.882,-**. Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 1

Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025
dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Belanja Barang dan Jasa		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp.	%
Belanja Barang dan Jasa	9.954.399.081	9.623.496.882	330.902.199	3,43

A.2.1 Belanja Hibah

Tidak terdapat Belanja Hibah pada Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur.

A.2.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 87.845.400,- dan Rp. 0,-. Rincian Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 disajikan dalam table berikut ini :



Tabel 2
Perbandingan Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2025 dan
31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Belanja Modal		Naik/Turun	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp.	%
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	87.845.400	0	87.845.400	100

3.2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Audited).

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. **5.356.994.627,00** yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. **89.143.645,00**, Aset Tetap sebesar Rp. **5.265.128.482,00** dan Aset lainnya sebesar Rp. **2.722.500,00**.



Nilai Kewajiban dan Ekuitas LO masing-masing sebesar Rp. **9.892.472,00** dan Rp.(**4.710.460.326,00**-), RK PPKD sebesar Rp. 0,- Sehingga di dapat nilai Kewajiban dan Ekuitas Sebesar Rp. **5.356.994.627,-**

3.2 NERACA

KELURAHAN JATINEGARA KAUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	CATATAN	JUMLAH	
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024(Audited)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	B.1.1	-	-
Belanja dibayar dimuka	B.1.2	5	9.885.042
Persediaan	B.1.3	89.143.640	74.471.142
Jumlah Aset Lancar	B.1	89.143.645	84.356.184
ASET TETAP			
Tanah	B.2.1	3.701.869.000	3.701.869.000
Peralatan dan Mesin	B.2.2	1.740.088.185	1.679.819.785
Gedung dan Bangunan	B.2.3	4.238.577.799	4.238.577.799
Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi penyusutan	B.2.4	(4.415.406.502)	(4.256.006.004)
Jumlah Aset Tetap	B.2	5.265.128.482	5.364.260.580
ASET LAINNYA			
Aset lain-lain	B.3.1	697.101.620	803.928.410
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	B.3.2	(694.379.120)	(737.429.285)
Jumlah Aset Lainnya	B.3	2.722.500	66.499.125
JUMLAH ASET		5.356.994.627	5.515.115.889
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		-	-



Utang Belanja	B.4.1	9.892.472	22.771.037
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	B.4	9.892.472	22.771.037
JUMLAH KEWAJIBAN		9.892.472	22.771.037

URAIAN	CATATAN	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH
		31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (Audited)	
EKUITAS EKUITAS Ekuitas-LO RK PPKD		(4.710.460.326) 0	(4.131.152.030) 9.623.496.882	(579.308.296) (9.623.496.882)
Jumlah Ekuitas	B.5	5.347.102.155	5.492.344.852	(145.242.697)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.356.994.627	5.515.115.889	(158.121.262)

3.2.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

B.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **89.143.645,-** dan Rp. **84.356.184,-**. Aset Lancar merupakan Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025 disajikan pada table berikut ini :



Tabel 3
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Aset Lancar	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
2.	Belanja dibayar dimuka	5	9.885.042
3.	Persediaan	89.143.640	74.471.142
	Jumlah	89.143.645	84.356.184

B.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-, yang merupakan kas yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran kegiatan yang menggunakan Uang Persediaan. Seluruh saldo kas pada Bendahara Pengeluaran Pembantu telah disetor pada tanggal 30 Desember 2025.

B.1.2 Belanja dibayar dimuka

Pada Tahun 2025 terdapat belanja dibayar dimuka sebesar Rp. 5,-. Yaitu pos Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional yang pada tanggal 31 Desember 2025 masih terdapat sisa saldo, dan saldo tersebut dapat digunakan pada tahun 2025.



B.1.3 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **89.143.640,-** dan Rp. **74.471.142,-**. Persediaan merupakan jenis asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal Neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

B.2 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **5.265.128.482,-** dan Rp. **5.364.260.580,-**. Aset Tetap merupakan aset berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur. Rician Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada table sebagai berikut :

Tabel 4

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025

No.	Aset Tetap	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Tanah	3.701.869.000	3.701.869.000
2.	Peralatan dan Mesin	1.740.088.185	1.679.819.785
3.	Gedung dan Bangunan	4.238.577.799	4.238.577.799
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-



5.	Aset Tetap Lainnya	-	-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7.	Akumulasi Penyusutan	(4.415.406.502)	(4.256.006.004)
	Jumlah	5.265.128.482	5.364.260.580,

B.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.701.869.000,-. Tanah merupakan Bangunan Kantor Pemerintah yang digunakan untuk Kantor Kelurahan Jatinegara Kaum yang diperoleh pada tanggal 31 Desember 1999 dengan luas 1.180 M2 sesuai Sertifikat No. SHP NO.34/Jatinegara Kaum tanggal 28 Januari 1999.

B.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.740.088.185,-. Pada tahun 2024 Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak ada penambahan peralatan dan mesin.

B.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 4.238.577.799,-. Berdasarkan KIB C Kelurahan Jatinegara Kaum Gedung dan Bangunan terdiri dari : Bangunan gedung Kantor Kelurahan yang terletak di Jl. TB. Badaruddin Tanah Koja I, RPTRA Jaka Berseri yang terletak di Rusunawa Kelurahan Jatinegara Kaum dan RPTRA Jaka Teratai yang terletak di Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta.



B.2.4 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. (4.415.406.502,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan.

B.3 Aset Lainnya

B.3.1 Aset lain-lain

Jumlah Aset Lainnya pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **2.722.500,-** dan Rp. **66.499.125,-** yang merupakan asset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut :

Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Aset Rusak Berat	0	803.928.410
2.	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(694.379.120)	(737.429.285)
	Jumlah	(694.379.120)	66.499.125



B.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 memiliki kewajiban jangka pendek yaitu utang TALI senilai Rp. 9.892.472,- yang terdiri dari Utang Belanja Listrik Kantor, Belanja Listrik RPTRA, Belanja Telepon Kantor, Belanja Air Kantor dan Belanja Air RPTRA Tagihan bulan Januari 2024 untuk pemakaian bulan Desember 2025.

B.5 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp. **5.347.102.155,-** dan Rp. **5.492.344.852,-**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

3.3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/deficit sebelum pos luar biasa dan surplus/deficit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menganggarkan penerimaan



pendataan. Jumlah beban untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. **10.042.244.481,-** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. **(10.042.244.481,-)**. Kelurahan Jatinegara Kaum Kota Administrasi Jakarta Timur tidak mengganggu Kegiatan Non-Operasional.

3.3 LAPORAN OPERASIONAL

KELURAHAN JATINEGARA KAUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN PER 31 DESEMBER 2025
DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN ASLI DAERAH		-	-
Pendapatan Pajak Daerah		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah		-	-
Lain-lain PAD yang sah		-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
BEBAN OPERASI		9.954.399.081	9.593.929.850
Beban Pegawai			-
Beban Barang	C.1	87.845.400	1.082.521.251
Beban Jasa	C.2		8.442.485.504
Beban Pemeliharaan	C.3		68.923.095
Beban Hibah			-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	C.4		221.819.018
Jumlah Beban Operasi		10.042.244.481	9.815.748.868
JUMLAH BEBAN		10.042.244.481	9.815.748.868
SURPLUS/DEFISIT-LO		(10.042.244.481)	(9.815.748.868)



3.3.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

C.1 Beban Barang

Jumlah Beban Barang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.1.082.521.251,- dan Rp. 1.060.277.787,-. Beban Barang adalah Konsumsi atas barang-barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

C.2 Beban Jasa

Jumlah Beban Jasa pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 8.442.485.504,- dan Rp. 8.227.909.045,-. Beban Jasa adalah Konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

C.3 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.68.923.095,- dan Rp. 241.877.180,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

C.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp.221.819.018,- dan Rp. 222.259.019,-. Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari aset tetap dalam rangka penyelenggaraan entitas.



3.4. Laporan Perubahan EKuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 5.687.037.871 ditambah Perubahan Ekuitas sebesar Rp. (2.441.033,00,-). Sehingga Ekuitas Akhir Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 5.684.596.838,-.

3.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 disusun dan disajikan menggunakan basis Akrua.

BAB VI PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, SKPD diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta.

Jakarta, 09 Maret 2026

MURAH KELURAHAN JATINEGARA KAUM



Henrica Kuswandari, S.P., M.Si.
NIP. 197107101998032006



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa		10.233.645.505,00	9.954.399.081,00	97,27	9.623.496.882,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		10.233.645.505,00	9.954.399.081,00	97,27	9.623.496.882,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		93.100.307,00	87.845.400,00	94,36	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		93.100.307,00	87.845.400,00	94,36	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		10.326.745.812,00	10.042.244.481,00	97,25	9.623.496.882,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(10.326.745.812,00)	(10.042.244.481,00)		(9.623.496.882,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(10.326.745.812,00)	(10.042.244.481,00)		(9.623.496.882,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 September 2026
KELURAHAN JATINEGARA KAUM - JAKTIM
PENRICKUS WANDARI S.P., MSI
197107101998032006